

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Desa Wisata Pedesaan: Studi Kasus Desa Ngargoretno, Indonesia

Muryanti 

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 52281, Sleman,

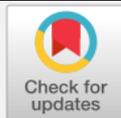
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: muryanti@uin-suka.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Muryanti, M. (2023). *Challenges and Opportunities in Developing Rural Tourism Villages: A Case Study of Ngargoretno Village, Indonesia*. *Society*, 11(2), 589-602.

DOI: [10.33019/society.v11i2.594](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.594)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 8 Agustus, 2023;

Diterima: 30 Desember, 2023;

Dipublikasi: 31 Desember, 2023;

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata rintisan telah menjadi alternatif penting dalam mengubah pola pertanian subsisten di pedesaan yang seringkali tidak menjamin pendapatan tetap setiap bulan dan hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Trend pengembangan desa wisata ini teramati di sebagian besar wilayah pedesaan dengan pertanian subsisten, yang memiliki potensi keunikan dalam sumber daya alam dan budaya yang dapat diperkenalkan melalui pemanfaatan dana desa. Proses pengembangan desa wisata rintisan di Desa Ngargoretno dimulai oleh inisiatif masyarakat dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan konsep desa wisata tersebut. Dukungan juga diberikan oleh pihak pemerintah desa dalam bentuk alokasi dana desa serta kegiatan pemberdayaan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi generasi muda sebagai penggerak utama dalam pengembangan desa wisata rintisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata rintisan, serta untuk mengidentifikasi peluang keberhasilan dalam pengembangan desa wisata rintisan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan stakeholder utama, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah desa yang terlibat dalam pengembangan desa wisata rintisan. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan, yang menekankan pada proses keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan desa wisata rintisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses

pengembangan desa wisata ini, masyarakat secara aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pengolahan objek wisata seperti pembersihan dan pengecatan marmer, serta pembangunan fasilitas umum seperti toilet. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada dan Dinas Pariwisata Magelang telah memperkaya paket wisata dengan menambahkan destinasi seperti wisata kebun teh, wisata religi, dan pengembangan kuliner lokal. Pengembangan desa wisata rintisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Ngargoretno melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari luar desa, serta memberikan peluang-peluang pekerjaan baru bagi generasi muda. Optimisme terus tumbuh, didukung oleh semangat antusiasme dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan konsep desa wisata rintisan ini.

Kata Kunci: Dana Desa; Desa Wisata; Model Rintisan; Pemberdayaan Masyarakat; Pengembangan Desa

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata memberikan sumbangan besar terhadap devisa negara yang mengakibatkan pembangunan wilayah dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Kebangkitan sektor pariwisata turut berperan dalam mendorong perekonomian nasional karena secara langsung menggerakkan industri, pertanian, transportasi, dan perdagangan (Bălan & Burghelea, 2015). Bahkan beberapa negara di dunia mengandalkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi nasional. Hal ini juga berlaku di negara-negara berkembang. Pembangunan sektor pariwisata mampu mempromosikan aktivitas ekonomi regional dan ekonomi makro (Sungkaew, 2020), termasuk pengembangan desa wisata yang sedang berkembang.

Pengembangan desa wisata telah menjadi prioritas di beberapa negara dengan berbagai alasan. Fiji, misalnya, telah mengembangkan desa wisata sejak tahun 1960-an dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, perkembangan desa wisata di Fiji telah terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas, meskipun dalam konteks lain, kebahagiaan masyarakat tidak selalu sejalan dengan perkembangan wisata (Pratt et al., 2016). Di sisi lain, pengembangan desa wisata di Fundata, Rumania, menunjukkan dampak positif tanpa merusak lingkungan alam, bahkan mampu meningkatkan daya tarik destinasi bagi wisatawan (Bălan & Burghelea, 2015). Pariwisata pedesaan di desa-desa kecil di Portugal Tengah dikembangkan untuk menonjolkan keunikan dan kekhasan desa yang berbeda dari yang lain, sehingga meningkatkan kepuasan wisatawan (Kastenholz et al., 2012).

Begitu juga dengan pengembangan wisata pedesaan di Gruza, Serbia, yang fokus pada keindahan alam, budaya, dan sejarah. Melibatkan partisipasi masyarakat melalui organisasi Knić, wisata pedesaan di Gruza menawarkan pengalaman wisata khas pedesaan, termasuk olahraga, pertanian, wisata alam, dan kuliner (Dimitrovski et al., 2012). Pengembangan wisata di desa juga dapat terjadi di wilayah yang menjadi proyek reintroduksi berang-berang Eurasia. Wisata di daerah tangkapan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan psikologis bagi

masyarakat setempat dan pengunjung, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan dampak emosional positif ketika melihat berang-berang (Auster et al., 2020). Namun, pengembangan pariwisata pedesaan di Iran juga menimbulkan dampak negatif, yang memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat (Ghaderi & Henderson, 2012).

Perkembangan desa wisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, didukung oleh perhatian besar pemerintah terhadap pembangunan desa melalui dana desa. Desa wisata telah menjadi salah satu bentuk pengembangan pariwisata alternatif dalam satu dasawarsa terakhir. Pada akhir 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penambahan objek wisata alam sebanyak 699 destinasi dan wisata air sebanyak 1000 destinasi pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik, 2019). Pertumbuhan jumlah objek wisata tersebut, terkait dengan peningkatan jumlah desa wisata. Pertumbuhan desa wisata juga signifikan di Bali, sebuah provinsi yang dikenal dengan industri pariwisata. Hingga tahun 2019, jumlah desa wisata di Bali mencapai 154. Pengembangan desa wisata alternatif dilakukan dengan memberikan pelayanan wisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal. Namun, dalam praktiknya, wisata alternatif ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan kreativitas, inovasi, pengembangan sumber daya yang memadai, dan manajemen pengelolaan desa wisata yang lebih profesional, guna memenuhi target yang lebih spesifik (Arismayanti et al., 2019).

Pengembangan desa wisata di Indonesia memiliki tujuan yang sejalan dengan desa wisata di negara lain, yaitu meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Tulisan ini membahas tentang desa wisata rintisan di Desa Ngargoretno, Magelang, Jawa Tengah, yang diinisiasi oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah desa. Desa ini termasuk dalam kategori "rintisan" karena masa pembentukannya yang relatif singkat (belum mencapai 10 tahun), modal usaha swadaya masyarakat yang terbatas, dana desa yang jumlahnya terbatas untuk pembangunan desa wisata, pengelolaan yang masih dalam proses pembelajaran, pendapatan yang belum signifikan dari wisatawan, dan adanya konflik dengan perusahaan tambang marmer yang memanfaatkan sumber daya alam marmer sebelumnya. Tulisan ini akan membahas proses pembentukan wisata rintisan dan peluang keberhasilan desa wisata rintisan tersebut dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan dikembangkan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses awal untuk menjadi lebih kuat dan percaya diri dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Konsep pemberdayaan dalam bidang sosiologi tidak dapat dipisahkan dari gerakan sosial. Pemberdayaan mengimplikasikan pertukaran kekuatan yang nyata antara aktor yang terlibat dalam gerakan tersebut. Konsep pemberdayaan dalam konteks gerakan sosial sering disebut sebagai pemberdayaan diri karena melibatkan keinginan dan inisiatif individu untuk meningkatkan diri secara bottom-up, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial di tingkat individu, komunitas, organisasi, atau kelompok (Kleidman et al., 1999; Weidenstedt, 2017). Pemberdayaan dalam konteks ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Pemberdayaan dalam kontek Gerakan Sosial

Sumber: (Weidenstedt, 2017)

Pemberdayaan dalam konteks pariwisata merupakan proses multidimensi yang tergantung pada konteks pariwisata, baik secara individu, kelompok, atau komunitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa isu yang sering dibahas terkait dengan pemberdayaan dalam pariwisata meliputi ketidakberdayaan, partisipasi masyarakat lokal, gender, karyawan, dan wisatawan (Aghazamani & Hunt, 2017).

2.2. Desa Wisata

Desa Wisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang tersaji dalam struktur kehidupan masyarakat yang bersatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Prinsip dasar pengembangan desa wisata adalah: (1) pengembangan fasilitas dalam skala kecil, (2) fasilitas tersebut dikerjakan dan dimiliki oleh penduduk desa, dan (3) pengembangan desa wisata didasarkan pada potensi desa, baik alamiah, sosial, maupun budayanya (Nuryanti, 1993).

Desa wisata melibatkan empat variabel utama sebagai penentu, yaitu: (1) keindahan alam, (2) keterampilan penduduk, (3) kebudayaan, dan (4) kedatangan orang. Suatu desa dapat disebut sebagai Desa Wisata jika memiliki keindahan alam, keterampilan penduduk yang dapat dipasarkan, kebudayaan yang khas, dan kedatangan orang ke desa tersebut. Semakin banyak variabel yang terdapat di suatu desa, maka semakin besar desa tersebut termasuk dalam definisi Desa Wisata menurut penelitian ini (Wulandari, 2020).

Pengembangan desa wisata memberikan efek domino bagi wilayah di sekitarnya. Dampak ekonomi merupakan hal yang sangat terlihat dari adanya desa wisata, terutama dengan adanya lapangan pekerjaan baru bagi pemuda-pemuda lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam skala luas, pengembangan wisata meningkatkan penyediaan infrastruktur, tersedianya modal, dan pembangunan yang berkualitas. Meskipun muncul beberapa masalah terkait dengan kurangnya sinergi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (Leonandri & Rosmadi, 2018).

Dengan adanya perubahan ekonomi, tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai tradisional, gaya hidup, dan hubungan antarpribadi di wilayah pedesaan. Pengembangan wisata juga berdampak pada transformasi sosiokultural di desa. Namun, perubahan sosial budaya di beberapa desa wisata di China menunjukkan beberapa perbedaan. Di Desa Kaiping, tidak terjadi perubahan sosial budaya secara ekstrim, melainkan melalui tahapan tertentu. Pada

tahap awal pengembangan pariwisata, nilai-nilai sosial budaya tradisional mempengaruhi kemajuan pembangunan. Setelah pariwisata tumbuh pada tingkat tertentu, nilai-nilai dan gaya hidup tradisional berusaha mencari titik keseimbangan. Hingga pada akhirnya, ketika pariwisata mencapai kondisi yang matang, nilai-nilai sosial budaya baru akan muncul. Di Desa Zili, pariwisata menimbulkan sikap "hedonisme" dan "kelambanan" ketika tekanan hidup berkurang, dan banyak penduduk desa mengejar keuntungan tanpa usaha. Di sisi lain, penduduk di desa yang kurang maju, seperti Desa Majianglong dan Desa Jinjiangli, sering mengalami ketidakpuasan dalam pembagian kerja dan distribusi kekayaan, yang dapat merusak hubungan harmonis dengan tetangga. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata menjadi katalisator utama perubahan nilai moral penduduk lokal (Zhuang et al., 2019), selain dari peningkatan ekonomi masyarakat desa.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi paradigma interpretatif. Paradigma ini bertujuan untuk memahami makna dan tindakan dari anggota kelompok sosial melalui partisipasi mereka dalam proses sosial (Antwi & Hamza, 2015). Peneliti berusaha untuk menggali interpretasi atau pendapat informan terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam merealisasikan ide tentang pengembangan desa wisata rintisan ini. Interpretasi ini sangat penting karena berkaitan dengan pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh informan terhadap desa wisata ini.

Penelitian sebelumnya tentang pariwisata di beberapa negara menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu pendorong ekonomi yang diprioritaskan dalam pengembangannya. Pengembangan pariwisata tersebut menekankan keunikan setiap tempat yang dikombinasikan dengan upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Penting juga untuk memperhatikan kelangsungan pariwisata yang dibangun dengan mempertimbangkan kondisi fisik, alam, dan masyarakat yang mendiaminya. Penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan keunikan lokasi dan kreativitas-inovasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

Penelitian ini dilakukan sebelum pandemi COVID-19, pada bulan Agustus/September 2019 di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Durasi penelitian berlangsung kurang lebih 2 bulan, mulai dari 1 Agustus hingga 30 September 2021. Proses pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Observasi, yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi desa wisata dan melakukan pengamatan langsung di beberapa lokasi. Pengamatan utama dilakukan di lokasi desa wisata dan tempat-tempat di mana warga berkumpul, dengan mencatat setiap percakapan atau deskripsi tentang lokasi wisata, serta sikap dan perilaku masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Data yang diperoleh dari observasi ini menjadi masukan dalam penulisan artikel ini ketika data tersebut tidak didapatkan melalui wawancara.
- 2) Wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mendapatkan data dari 11 informan menggunakan daftar pertanyaan terbuka. Informan terdiri dari berbagai latar belakang, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan
1	Sigit (35)	Ketua LPP (Lembaga Pemberdayaan Pemuda)
2	Sutini (40)	Ibu Rumah Tangga
3	Widiasto (44)	Kepala Urusan Keuangan Desa Ngargoretno
4	Sarif Hidayat (49)	Petani
5	Sri Wahyuningsih (46)	Guru TK
6	Dodik Suseno (40)	Kepala Desa
7	Ahmad Bilal (44)	Anggota BUMDes dan Pokdarwis
8	Hardianto (42)	Anggota BUMDes dan Petani
9	Sarji (50)	Petani Kopi
10	Via (29)	Ibu Rumah Tangga
11	Anton Widodo (36)	Ojek Online

Sumber: Data Primer, 2020

Informan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan stakeholder yang mendukung pengembangan wisata, termasuk pemerintah desa, BUMDes, petani, dan masyarakat Desa Ngargoretno yang terlibat dalam pengembangan desa wisata rintisan.

Analisis data dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, yang kemudian dipadukan dengan teori dan studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan setelah melakukan klasifikasi, reduksi, dan pengkodean data yang diperoleh untuk kemudian disusun menjadi narasi yang utuh.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pertanian Subsisten sebagai Tantangan dalam Pengembangan Desa Wisata

Salah satu faktor utama yang mendorong pengembangan desa wisata di Desa Ngargoretno adalah kondisi pertanian subsisten yang terjadi di wilayah tersebut. Pertanian di desa ini, khususnya pertanian tegalan (perkebunan) di lereng bukit, tidak memberikan harapan bagi masyarakat setempat. Sawah yang terletak di lereng bukit mengalami kekurangan air, menyebabkan petani hanya dapat melakukan satu kali panen pada musim hujan. Bahkan jika terjadi dua kali panen, itu pun hanya pada musim hujan. Setelah panen pertama selesai, petani harus segera menanam kembali untuk mendapatkan panen kedua. Hasil panen dari pertanian ini tidak sebanyak pertanian di dataran rendah, yang biasanya dapat panen dua kali dalam setahun karena pasokan air yang mencukupi (Sigit, 2019).

Kondisi lahan yang terletak di lereng bukit menyebabkan sebagian besar petani memiliki lahan yang terbatas untuk bertani. Kemiringan perbukitan dan keberadaan batu kapur membuat hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh di sana. Komoditas utama petani meliputi palawija, cengkeh, kopi, jahe, laot, aren, jagung, padi, ketela, pisang, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, temu ireng, dan berbagai jenis empon-empon yang dapat tumbuh secara alami tanpa penanaman. Selain tanaman empon-empon, petani perkebunan di lereng bukit juga menanam tanaman keras seperti jati, mahoni, besia, dan sengon (Hidayat, 2019; Sigit, 2019; Sutini, 2019). Tanaman-tanaman ini merupakan jenis tanaman perkebunan yang tidak

terpengaruh oleh musim dan membutuhkan sedikit air. Proses penanaman dilakukan dengan metode campursari, di mana berbagai macam tanaman ditanam bersamaan atau dikenal juga dengan sistem tumpang sari. Sebagai contoh, petani menanam pohon cengkeh dan di bawahnya ditanami tanaman empon-empon (Widodo, 2019).

Petani di desa ini mayoritas termasuk dalam kategori petani subsisten. Pertanian subsisten ini merujuk pada pertanian dalam skala kecil, dengan input yang rendah dan teknologi terbatas, yang lebih mengandalkan metode pertanian tradisional. Sebagian besar hasil produksi pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan hanya jika berlebih, dijual (Kostov & Lingard, 2004). Salah satu alasan utamanya adalah karena hasil panen padi, yang digunakan untuk konsumsi sendiri atau dijadikan bahan jamu dari empon-empon, sehingga kegagalan panen merupakan bencana bagi petani (Hidayat, 2019; Sigit, 2019). Selain itu, hasil komoditas perkebunan biasanya dijual. Keterbatasan kepemilikan lahan juga menjadi ciri khas pertanian subsisten, dengan rata-rata kepemilikan hanya sekitar 1000 m² per petani. Mayoritas petani adalah buruh tani tanpa lahan, dengan sebagian besar lahan yang dimiliki adalah tegalan, bukan sawah. Hanya sekitar 10% dari total petani yang memiliki lahan sendiri. Bagi petani yang tidak mampu menggarap lahan, mereka mengandalkan bantuan orang lain dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada kepercayaan dan gotong royong. Pertanian dan peternakan menjadi cara bertahan hidup bagi sebagian besar petani, sementara mereka bekerja di kota untuk mencari penghasilan tambahan. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan di kota biasanya lebih pasti, seperti di pabrik, sebagai wiraswasta, kuli bangunan, toko, atau di perusahaan, dibandingkan dengan pertanian yang tidak menjamin upah yang jelas. Oleh karena itu, pengembangan pertanian perlu diintegrasikan dengan pariwisata untuk menarik minat dan menjanjikan penghasilan bagi generasi muda.

Pertanian subsisten, yang sering kali berhubungan dengan kemiskinan dan penghasilan rendah serta dilakukan untuk bertahan hidup (Kostov & Lingard, 2004), tentu saja tidak memberikan harapan bagi para petani, termasuk generasi muda yang diharapkan dapat mengembangkan sektor pertanian. Mayoritas petani muda yang terlibat dalam pekerjaan pertanian tidak banyak, dan sebagian besar dari mereka hanya membantu orang tua mereka bukan sebagai mata pencaharian utama, karena mereka memiliki pekerjaan lain di kota dengan upah yang pasti setiap minggu atau bulan. Bahkan jika ada yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama, hal itu biasanya karena mereka sudah menikah dan memilih untuk bertani. Alasan utama kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian adalah karena pertanian tidak menjanjikan penghasilan pasti dan tidak dapat diandalkan. Selain itu, bekerja sebagai petani juga sering kali membuat rasa malu di kalangan generasi muda karena kurangnya inovasi dalam kebijakan pertanian, proses pertanian yang lambat, sementara generasi muda saat ini cenderung menginginkan hasil yang cepat. Oleh karena itu, banyak yang lebih memilih untuk bekerja di kota karena lebih cepat menghasilkan uang (Sarji, 2019).

4.2. Membangun Wisata Desa sebagai Peluang Peningkatan Ekonomi

Selain pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat, kondisi geografis di Desa Ngargoretno yang berbukit dan berkapur menjadikannya sebagai lokasi tambang batu marmer. Awalnya, masyarakat desa tidak menyadari keberadaan marmer di desa mereka. Mereka mengira desa mereka bernama Ngargo karena asosiasi dengan gunung, dan "retno" berarti emas, sehingga secara harfiah diartikan sebagai "gunung emas". Masyarakat mengenal batu tersebut sebagai batu gamping, bukan marmer atau emas. Anggapan bahwa itu hanya batu gamping biasa mengakibatkan mereka membakar lahannya dan mengubahnya menjadi lahan perkebunan (Sigit, 2019). Hanya pemerintah desa sebelumnya dan perusahaan yang

mengetahui tentang tambang marmer ini. Sementara itu, masyarakat kurang memahami keberadaan perusahaan karena mereka hanya mengetahui tentang pembebasan lahan. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang bekerja di tambang (Bilal, 2019).

Masyarakat mulai menyadari potensi batu marmer ketika salah satu perusahaan nasional, yaitu PT Margula dan PT Madari, masuk pada tahun 1980-an. Sebagian kecil warga bekerja di perusahaan tersebut, sementara sebagian lainnya bekerja secara independen. Petani berusaha meningkatkan penghasilan dengan mencari batu marmer secara kiloan setelah panen dengan berat berkisar antara 30-40 kg, yang kemudian dijual kepada PT dengan harga per kilogramnya sebesar 1 rupiah (Widiasto, Agustus 2019). PT Margula juga menawar tanah warga di sekitar tambang untuk dibeli dan dijadikan tambang, dengan harga murah dan menawarkan iming-iming DP pada masa lebaran, sehingga banyak warga yang tertarik untuk menjual tanahnya. Namun, penjualan tanah tidak berlangsung lama karena banyak data yang tidak valid (Wahyuningsih, 2019).

Selama operasional tambang, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan marmer dapat dihitung dari harga penjualan satu ubin marmer berukuran 60 x 40 m² seharga 1 juta, dengan jumlah produksi sekitar 800 m³ per bulan (Wahyuningsih, 2019). Namun, keuntungan yang diperoleh oleh warga tidak sebesar yang didapatkan oleh perusahaan marmer. Hanya sebagian kecil dari warga masyarakat yang bekerja di tambang, sementara akses jalan menjadi rusak, dan perusahaan tidak memberikan sumbangan langsung kepada desa, kecuali pada perayaan tujuh belasan Agustus, dimana pemuda menerima sumbangan sebesar 2 juta (Suseno, 2019). Bahkan, petani yang ingin masuk ke lokasi tambang tidak diizinkan karena pabrik dikelilingi oleh pagar besi. Hanya petani yang biasa mencari rumput dan mengenal dengan baik petugas atau satpam sekitar 4 orang yang diizinkan (Via, 2019).

Operasional PT Margula juga tidak berlangsung lama. Pada tahun 2000-an, PT Margula tidak memperpanjang usahanya karena izin usahanya tidak dapat diperpanjang di Provinsi tersebut. Di sisi lain, kampanye yang dilakukan oleh sebagian pemuda mengenai dampak lingkungan dari tambang mulai diterima oleh warga desa. Mereka menduga bahwa cadangan batu semakin menipis, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mesin getar dapat berdampak buruk pada lingkungan. Meskipun dampaknya mungkin belum terasa dalam 10 hingga 20 tahun, namun generasi mendatang akan merasakannya (Widiasto, 2019).

Mengingat PT tersebut sudah tidak beroperasi, bekas tambang tersebut kini dikelola oleh masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan berupa mesin pengolah marmer dan kemudian memberikan pelatihan kepada masyarakat oleh Dinas Pertambangan provinsi tentang cara pengolahan marmer untuk dijadikan souvenir. Namun, hal tersebut ternyata tidak mudah karena masyarakat kesulitan mengoperasikan peralatan yang rumit dan membutuhkan alat-alat canggih. Jika diproses secara manual, biaya operasionalnya akan terlalu tinggi (Widodo, 2019). Pada tahun 2004, pemerintah membawa investor untuk mendirikan kerajinan marmer yang sekarang berada di bawah tempat penggilingan cengkeh. Mesin sudah tersedia dan pada awalnya kita mempekerjakan masyarakat dengan optimis, namun akhirnya usaha tersebut berhenti pada tahun 2005 karena kesulitan menjaga kebersamaan (Sigit, 2019).

Selama proses penambangan yang dilakukan oleh PT, konflik antara warga masyarakat dan pemilik tambang sudah terjadi. Pihak yang terlibat konflik dengan penambang adalah masyarakat yang tanahnya dijadikan tambang dan pemuda yang tergabung dalam paguyuban Pawartoretno yang bekerja sama dengan LSM dan mendatangkan investor untuk mengelola tambang sendiri (Hardianto, 2019). Awalnya, masyarakat berkeinginan untuk melakukan penambangan secara mandiri agar dapat memiliki sumber penghasilan tambahan selain dari pertanian. Namun, ketika penambang datang dari wilayah kota dan membeli tanah dari warga

masyarakat, konflik pun terjadi. Perusahaan hanya membayar tanah kepada warga sebesar 400 ribu, sementara harga jual dari hasil tambang mencapai sekitar 1,3 juta rupiah (Widiasto, 2019).

Ketika tambang baru beroperasi, warga merasa gelisah karena ada orang asing yang datang dan merusak tanah mereka. Masyarakat desa merasa diperdaya karena hanya beberapa orang tertentu yang mendapat keuntungan tanpa bertanggung jawab terhadap wilayah mereka sendiri, sehingga mereka melakukan penolakan (Suseno, 2019; Wahyuningsih, 2019). Penolakan juga terjadi selama proses penambangan berlangsung, dimana sekitar 80% lahan yang telah dijadikan tambang mengalami kerusakan dan menguras sumber mata air terbesar yang berada di bawahnya karena air digunakan untuk proses penambangan dan menjadi limbah. Hal ini menyebabkan kekurangan air bersih bagi warga. Meskipun demikian, perusahaan tetap melanjutkan operasinya, meskipun dengan berbagai cara, termasuk memberikan uang untuk memperoleh izin. Di sisi lain, masyarakat semakin merasa jenuh melakukan perlawanan atau demonstrasi (Sigit, 2019).

Untuk menyelesaikan konflik tersebut, dilakukan mediasi antara warga masyarakat dan perusahaan (Sutini, 2019). Meskipun mediasi sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat, dimana masyarakat meminta agar alam tidak dirusak, namun titik temu tidak dapat ditemukan, "maunya masyarakat ya tidak boleh ditambang" (Hidayat, 2019). Namun, kecenderungan warga agak lemah dalam menyikapi keberadaan tambang. Sebagian warga juga bekerja di tambang dan adanya ikatan saudara, yang mengurangi intensitas konflik secara terbuka (Sigit, 2019). Lemahnya sikap warga ini disebabkan oleh karakteristik petani gunung yang lebih menerima kedatangan masyarakat kota yang datang untuk menambang. Selain itu, pemerintah, melalui Dinas Pertambangan, juga memberikan izin kepada PT tersebut untuk beroperasi, sehingga diterima oleh masyarakat desa (Bilal, 2019).

Konflik saat ini telah mereda karena masyarakat memilih untuk tidak mengambil tindakan, karena perusahaan telah menjadi pemenang dengan lahan yang telah menjadi miliknya (Wahyuningsih, 2019), dan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi (Sutini, 2019). Konflik yang terjadi tidak sampai memuncak dalam bentuk adu fisik karena pihak tambang menggunakan preman, sehingga masyarakat merasa terancam. Selain itu, di kalangan masyarakat sendiri terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal karena beberapa warga bekerja di tambang, sehingga masyarakat terbagi menjadi yang mendukung dan menentang (Hardianto, 2019).

Dapat dikatakan bahwa tidak ada pihak yang menang atau kalah, karena PT Margula telah memiliki hak milik atas tanah dan perijinannya dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi untuk menantang hal tersebut (Via, 2019). Sampai saat ini, konflik antara masyarakat dan perusahaan belum menemukan solusi, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Masyarakat tidak ingin lingkungan mereka dirusak, sementara perusahaan tetap ingin melanjutkan kegiatan penambangan. Namun, jika mediasi dapat dilakukan kembali dan tambang dialihfungsikan menjadi objek wisata, mungkin akan ditemukan titik tengahnya (Widodo, 2019).

Ide pembentukan desa wisata berasal dari GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang didukung oleh Kepala Desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) antar dusun di Ngargoretno (Wahyuningsih, 2019). Pokdarwis ini dibentuk di setiap 10 RT dengan anggota dari lintas generasi (muda, tua, ibu-ibu, dan dewasa) (Sigit, 2019). Keterlibatan banyak pihak ini tercermin dari berbagai peran yang mereka lakukan dalam mengembangkan desa wisata ini (Sutini, 2019). Tokoh utama dalam pengembangan desa wisata ini adalah tokoh muda desa yang dikenal sebagai Pak Soim dan Kepala Desa sebagai pemegang otoritas desa (Via, 2019). Namun, hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam proses awal ini karena banyak dari mereka yang bekerja di luar kota (Widiasto, 2019). Saat ini,

masih dalam proses untuk melibatkan lebih banyak pemuda (Sigit, 2019), dengan kriteria pemuda yang terlibat adalah mereka yang tidak merantau dan bukan usia sekolah (Bilal, 2019). Peran pemuda terletak pada partisipasinya dalam pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata, yang awalnya hanya berupa jalan setapak yang dikerjakan melalui gotong royong (Widodo, 2019), yang rutin dilakukan setiap bulan (Wahyuningsih, 2019). Hasil dari kerja gotong royong tersebut adalah jalan yang sudah bisa dilalui oleh umum dengan batuan yang tertata rapi (Hidayat, 2019). Selain itu, pemuda juga bekerja sama dengan ibu-ibu untuk menyumbangkan kuliner seperti krupuk regedek, kripik jentik manis. Beberapa pemuda juga mulai membudidayakan kopi merah yang juga menjadi kopi khas desa, dikelola secara sederhana, mulai dari proses penyangraian dilakukan di atas tungku tradisional, kemudian proses penumbukan dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin penggiling (Wahyuningsih, 2019). Pendirian desa wisata juga melibatkan beberapa pihak, termasuk LSM, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memberikan ide tentang paket makanan di area wisata (kopi merah dan kopi liar, hasil jamu-jamuan, dan makanan tradisional desa) (Sarji, 2019), dan mereka juga merintis wisata kebun teh di Samigaluh (Bilal, 2019). Tokoh lain yang terlibat adalah Kelompok Pokdarwis dengan ketua di Dusun Karang Sari adalah Mbah Ponco, wakilnya adalah Mas Aan, dan Paguyuban Parworetno (Soim, 2019).

Keterlibatan beberapa pihak tersebut disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pengembangan desa wisata, terutama di Desa Ngargoretno, dengan faktor utama potensi alam berupa bekas tambang marmer yang jarang terdapat di daerah lain (Sigit, 2019). Faktor lain yang mendorong pengembangan desa wisata ini adalah instruksi dari Bupati untuk menciptakan Desa Wisata sebagai bagian dari arahan Presiden Jokowi melalui bantuan dana desa. Langkah awal dari pengelola desa wisata ini adalah menghubungi pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi wisata. Setelah mendapat persetujuan, pengelolaannya dilakukan melalui BUMDES yang dibentuk seiring dengan alokasi dana desa. Kegiatan BUMDES mencakup pengembangan pertanian, pengembangan wisata, penanaman kopi, serta koperasi untuk pupuk (Widiasto, 2019). Pada tahap awal, pengelola melakukan penghalusan batu marmer merah melalui kerja gotong royong dengan melibatkan warga masyarakat (Hardianto, 2019).

Modal awal untuk pengembangan MAMI berasal dari alokasi dana desa sebesar 50 juta yang disediakan oleh Kepala Desa melalui BUMDes untuk pengembangan destinasi (Wahyuningsih, 2019), salah satunya digunakan untuk penghalusan batu marmer MAMI (Hidayat, 2019). Obyek wisata MAMI diharapkan dapat mandiri dalam pembiayaannya ke depannya. Dana 50 juta tersebut merupakan bagian dari dana desa sebesar 811 juta yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan dan jalan-jalan desa serta pembangunan desa wisata (Sutini, 2019). Kepala desa juga mendorong setiap RT untuk melakukan kerja bakti sendiri. Beberapa RT memilih untuk mengembangkan jalur trekking ke area marmer karena kendala laporan yang menyebabkan tidak bisa menggunakan anggaran BUMDes (Widiasto, 2019). Selain dana dari Dana Desa, MAMI juga menerima bantuan dari Dinas dan Kementerian Pariwisata untuk membangun jalan (Hidayat, 2019). Hingga saat ini, belum ada laporan pendapatan dari Desa Wisata MAMI sehingga pembagian pendapatan masih belum bisa dilakukan (Widodo, 2019). Rencananya, pembagian pendapatan akan dilakukan dengan Pokdarwis, pemilik lahan, pengelola, dan desa karena menggunakan anggaran BUMDes (Sigit, 2019).

Lokasi pengembangan wisata desa yang dikenal dengan Museum Alam Marmer Indonesia (MAMI) ini berada di bekas lokasi tambang yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak memberikan izin pendirian tambang,

sehingga penambangan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan (Soim, 2019). Perubahan lokasi tersebut disebabkan oleh kebangkrutan pabrik karena tidak mampu menutupi biaya operasional yang tinggi, termasuk biaya tenaga kerja dan penggunaan mesin, serta kesulitan dalam mengubah bekas tambang menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, menjadikan bekas tambang sebagai tempat wisata batu marmer dianggap sebagai pilihan yang tepat. Proses ini dimulai dengan mengajukan izin kepada pemerintah Kabupaten untuk mendirikan museum alam karena keberadaan marmer merah yang terbuka dan alami, dengan ketinggian mencapai 70-80 meter.

Penamaan museum ini masih dalam proses rintisan yang diharapkan dapat berkembang lebih luas di masa depan, dengan menyediakan penjelasan sejarah tentang batu alam dalam bentuk edukasi mengenai batu marmer. Selain MAMI sebagai daya tarik utamanya, terdapat juga petilasan Sunan Kalijaga dan makam leluhur yang akan dikembangkan menjadi tempat wisata alam dan religi. Para wisatawan yang berkunjung ke MAMI akan memiliki kesempatan untuk melihat marmer sekaligus berziarah ke makam. Selain dikombinasikan dengan aspek religi, paket wisata lainnya dapat mencakup produk pertanian (seperti kopi merah), kesenian, wisata jalan-jalan, trekking, spot selfie, peternakan kambing Etawa, panorama sunrise, serta wisata kebun teh seperti yang ada di Kulon Progo. Secara umum, potensi yang ada di Desa Ngargoretno dapat dikembangkan secara maksimal.

Pembangunan wisata rintisan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk semua pemangku kepentingan yang mendukung pengembangan wisata rintisan ini. Wisata rintisan menjadi harapan bagi masyarakat untuk membuka peluang lapangan kerja. Perubahan ekonomi masyarakat diikuti oleh perubahan sosial yang semakin kuat. Solidaritas sosial di masyarakat telah memperkuat pembangunan desa wisata rintisan pada tahap awal.

4.3. Hambatan dan Tantangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata membawa dampak positif dan negatif. Kehadiran desa wisata membuat desa menjadi ramai dengan kunjungan wisatawan (Sigit, 2019), serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Sutini, 2019). Selain itu, terjadi pemberdayaan melalui inovasi kuliner, didirikannya usaha kopi oleh masyarakat, dan pembangunan jalan menggunakan dana desa yang meningkatkan kualitas jalan (Hidayat, 2019). Meskipun ekonomi mulai berkembang, namun pendapatan yang diperoleh masih belum optimal karena manajemen wisata yang belum teratur dan masih dalam tahap pengembangan (Wahyuningsih, 2019). Pendapatan masih didapat dari kotak donasi di pintu masuk karena belum diberlakukan tiket masuk dan paket wisata (*outbond*) (Widiasto, 2019).

Keuntungan dari desa wisata belum sepenuhnya dalam bentuk uang, tetapi lebih pada organisasi yang lebih baik dari pemuda, motivasi untuk membangun desa yang lebih tinggi, serta realisasi cita-cita dan ide-ide mereka (Hidayat, 2019). Selain itu, masyarakat desa mulai memahami tata ruang dan cara menata desa wisata, terkait dengan lingkungan alam, tempat produksi pertanian, dan kesenian (Wahyuningsih, 2019). Potensi pertanian (seperti kopi, singkong, jahe instan, temulawak instan) dan peternakan (kambing Etawa) dapat dikembangkan dan dijual sebagai paket wisata di desa wisata yang terintegrasi dengan MAMI (Sutini, 2019). Seiring berjalannya waktu, pendapatan masyarakat Desa Ngargoretno meningkat dengan adanya desa wisata, didukung oleh makanan khas seperti kopi, geblek, nasi jagung, dan keripik talas (Bilal, 2019). Sarana dan prasarana juga semakin meningkat dengan perbaikan jalan desa, sehingga akses ke lokasi lebih mudah (Hardianto, 2019).

Mengingat bahwa pada awal proses pendirian desa wisata ini, pemberdayaan masyarakat adalah aspek kunci, melalui keterlibatan mereka dalam pembangunan MAMI. Oleh karena itu,

tugas penting adalah menanamkan nilai kepada masyarakat tentang pentingnya wisata tanpa mengorbankan solidaritas di antara mereka (Sigit, 2019), serta mempersiapkan mereka untuk menjadi tuan rumah yang ramah terhadap wisatawan (Sutini, 2019). Ini merupakan modal awal yang sangat penting (Suseno, 2019). Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat selalu mengasumsikan adanya dampak negatif dari pengembangan wisata, proses penyadaran dilakukan secara bertahap melalui berbagai acara desa wisata dan pelatihan per dusun yang dibantu oleh tim dari Universitas Gadjah Mada untuk pengemasan kuliner dan manajemen (Widiasto, 2019). Proses komersialisasi belum dapat dimulai karena tahap awal yang terpenting bagi masyarakat adalah menanamkan keinginan sungguh-sungguh untuk membangun desa dengan kekuatan dan kemampuan pribadi masing-masing (Soim, 2019). Sejalan dengan keinginan Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata, masyarakat diharapkan untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Meskipun pada awalnya, pengembangan desa wisata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama dengan para tokoh agamawan. Mereka melihat desa wisata dari sisi negatif, terutama dalam hal penampilan wisatawan yang tidak sesuai dengan norma agama Islam, seperti halnya para wisatawan yang datang ke Candi Borobudur (Hidayat, 2019).

Hingga saat ini, desa wisata ini hanya mengandalkan semangat dan dukungan utama dari desa melalui BUMDes, dengan modal usaha dan pembinaan di tingkat desa serta di kalangan pemuda desa (Soim, 2019). Kerjasama belum terlalu banyak dilakukan dengan pihak lain (Suseno, 2019). Tahap awal baru mencakup studi banding ke Pulesari sebagai desa wisata yang lebih matang daripada Ngargoretno (Hidayat, 2019). Kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Pariwisata yang sangat mendukung pengembangan desa wisata (Suseno, 2019).

Dalam proses pengembangan desa wisata, Kepala Desa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan mendatangkan tenaga ahli untuk memfasilitasi pembangunan desa wisata ini. Pendampingan dilakukan dengan merapikan lokasi wisata, merelokasi tempat duduk, serta membangun MCK. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan melibatkan penataan tempat wisata serta pengembangan kopi sebagai produk lokal dan peternakan sebagai aktivitas yang terintegrasi dengan pariwisata. Untuk meningkatkan dinamika masyarakat, dilakukan program Jumat bersih dan Lomba Dusun Bersih sebagai kegiatan pendukung pariwisata (Sigit, 2019). Sementara itu, BUMDes memberdayakan usaha kopi dengan mencari alat-alat, membantu proses perijinan, serta melatih kelompok tani dari berbagai daerah tentang kopi dan pembuatan produk oleh-oleh (Sarji, 2019; Via, 2019).

Dalam proses pengembangan desa wisata ini, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, masih diperlukan pembenahan pada akses jalan menuju lokasi, seperti fasilitas tempat duduk dan MCK (Widiasto, 2019). Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengembangan belum optimal, dengan sebagian berpartisipasi dan sebagian lainnya tidak (Hidayat, 2019). Ketiga, pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai tingkat maksimal (Wahyuningsih, 2019). Selain itu, kebersatuan masyarakat juga masih kurang solid karena belum ada sistem bagi hasil yang jelas, sehingga mengelola desa menjadi "siapa yang mau" (Suseno, 2019). Selain itu, desa wisata ini juga menghadapi kendala kekurangan dana dan pasokan air yang tidak mencukupi, terutama saat musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan, sementara pada musim hujan, risiko longsor menjadi ancaman karena tanah yang labil di daerah tersebut (Bilal, 2019). Selain itu, promosi kurang optimal dan akses masih sulit, sehingga mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan wisata ini (Sarji, 2019).

Masyarakat berharap adanya peningkatan pendapatan, kemajuan desa, dan partisipasi aktif pemuda di desa yang dapat mengurangi migrasi ke kota (Sigit, 2019). Mereka juga berharap akan adanya peningkatan jumlah pengunjung (Sutini, 2019), serta tumbuhnya sikap terbuka

masyarakat terhadap orang asing (wisatawan), yang dapat diperkuat melalui kerjasama dengan tokoh agama melalui kegiatan pengajian berkala (Bilal, 2019; Widiasto, 2019). Untuk mengatasi masalah kekurangan air di lokasi wisata, dapat dilakukan upaya penataan yang lebih baik, termasuk peningkatan keindahan batu, penataan tempat, dan penanaman tanaman yang tidak membutuhkan banyak air (Hidayat, 2019). Selain itu, Pemerintah desa memiliki rencana untuk mengembangkan daerah perbatasan menjadi trekking edukasi marmer, serta menggalakkan pertanian untuk mendukung wisata, seperti dengan mempromosikan perkebunan kopi dengan merek kopi liar dan kopi merah. Harapannya, semua aktivitas warga dapat mendukung pengembangan wisata (Wahyuningsih, 2019). Upaya pemasaran paket wisata juga perlu ditingkatkan agar lebih menarik (Suseno, 2019), dan perlu adanya rencana jangka panjang untuk mengembangkan wisata religius agar dapat beriringan dengan aspek religi (Bilal, 2019).

Mengingat bahwa pengembangan wisata di Desa Ngargoretno masih dalam proses, penting untuk melakukan studi banding ke daerah wisata yang telah berkembang, terutama yang memiliki kondisi serupa, seperti destinasi wisata alam marmer. Pelatihan juga perlu diberikan kepada individu yang akan terlibat dalam industri pariwisata, terutama para pemuda, dalam bidang seperti pemasaran, humas, pemandu wisata, pelatihan kuliner, dan pembuatan kopi khas Desa Ngargoretno (Hidayat, 2019).

5. Kesimpulan

Penelitian tentang desa wisata Museum Alam Marmer Indonesia ini dilakukan pada tahap awal pengembangan dan pembangunan wisata. Oleh karena itu, data yang diperoleh lebih banyak mengenai dinamika masyarakat yang sedang berproses dalam mewujudkan ide pembuatan desa wisata ini. Selama proses tersebut, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi, dipengaruhi oleh rendahnya hasil pertanian serta keberhasilan ekonomi masyarakat di Kawasan Wisata Candi Borobudur yang berdekatan dengan Desa Ngargoretno. Antusiasme masyarakat tercermin dalam berbagai kegiatan gotong royong, seperti pembangunan jalan menuju lokasi wisata, pengembangan kuliner khas desa, penyusunan program dan paket wisata, serta kegiatan membersihkan desa secara bersama-sama dan berpartisipasi sukarela dalam berbagai kegiatan pengembangan desa wisata rintisan ini.

Desa wisata rintisan ini merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan warga. Sebagian dana desa dialokasikan untuk memoles marmer merah sebagai atraksi wisata alam dan edukasi, serta untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan dan mempercantik lokasi wisata tersebut. Pemberdayaan juga dilakukan melalui pendidikan tentang pentingnya wisata rintisan untuk keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana bersikap ramah terhadap wisatawan dan mengemas wisata desa menjadi lebih menarik.

Harapan ke depannya, desa wisata rintisan ini dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Secara sosial, diharapkan desa tetap mempertahankan kolektivitas dan religiusitasnya. Secara ekonomi, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan terciptanya lapangan kerja bagi generasi muda sehingga desa menjadi tempat yang dinamis dan berkembang menjadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian awal yang diuraikan dalam tulisan ini, menjadi penting bagi peneliti berikutnya untuk menindaklanjuti riset ini pasca pengembangan ide awal desa wisata rintisan. Perlu dipelajari bagaimana perkembangan program-program wisata yang telah dirintis sebelumnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, terutama di tengah situasi pandemi saat ini. Selain itu, perlu dievaluasi juga keuntungan yang diperoleh dari desa wisata tersebut, apakah sesuai dengan target awal yang dijanjikan kepada pengelola BUMDes sebagai

pemberi dana awal, serta apa dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga sekitar akibat adanya desa wisata rintisan ini.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Ngargoretno, terutama kepada pengelola Desa Wisata Museum Alam Marmer Indonesia (MAMI), atas informasi yang diberikan terkait dengan proses awal pembentukan desa wisata ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aghazamani, Y., & Hunt, C. A. (2017). Empowerment in Tourism: A Review of Peer-reviewed Literature. *Tourism Review International*, 21(4), 333–346. <https://doi.org/10.3727/154427217X15094520591321>
- Antwi, S. K., & Hamza, K. (2015). Qualitative and Quantitative Research Paradigms in Business Research: A Philosophical Reflection. *European Journal of Business and Management*, 7(3), 217–225.
- Arismayanti, N. K., Sendra, I. M., Suwena, I. K., Budiarsa, M., Bakta, I. M., & Pitana, I. G. (2019). Tourism Villages' Development in Bali, Mass or Alternative Tourism? *JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT*, 7(2), 117–139. <https://doi.org/10.15640/jthm.v7n2a11>
- Auster, R. E., Barr, S. W., & Brazier, R. E. (2020). Wildlife tourism in reintroduction projects: Exploring social and economic benefits of beaver in local settings. *Journal for Nature Conservation*, 58, 125920. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125920>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2019*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/08/24/edcf494ac7e2589a0d9b0793/statistik-objek-daya-tarik-wisata-2019.html>
- Bălan, M., & Burghelea, C. (2015). Rural Tourism and its Implication in the Development of the Fundata Village. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 188, 276–281. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.393>
- Bilal, A. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Dimitrovski, D. D., Todorović, A. T., & Valjarević, A. D. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in the Region of Gruža, Serbia. *Procedia Environmental Sciences*, 14, 288–297. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.03.028>
- Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). Sustainable rural tourism in Iran: A perspective from Hawraman Village. *Tourism Management Perspectives*, 2–3, 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.03.001>
- Hardianto. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Hidayat, S. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.

- Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Peixeira Marques, C., & Lima, J. (2012). Understanding and managing the rural tourism experience – The case of a historical village in Portugal. *Tourism Management Perspectives*, 4, 207–214. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009>
- Kleidman, R., McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1999). Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. *Social Forces*, 78(2), 838. <https://doi.org/10.2307/3005598>
- Kostov, P., & Lingard, J. (2004). Subsistence Agriculture in Transition Economies: Its Roles and Determinants. *Journal of Agricultural Economics*, 55(3), 565–579. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2004.tb00115.x>
- Leonandri, D., & Rosmadi, M. L. N. (2018). The Role of Tourism Village to Increase Local Community Income. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(4), 188–193. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.113>
- Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan. *Konferensi Internasional Pariwisata Budaya*.
- Pratt, S., McCabe, S., & Movono, A. (2016). Gross happiness of a “tourism” village in Fiji. *Journal of Destination Marketing & Management*, 5(1), 26–35. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.11.001>
- Sarji. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Sigit. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Soim. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Sungkaew, P. (2020). Tourism and long-run economic growth in Thailand: From 1960 to 2018. *Asia-Pacific Social Science Review*, 20(2), 159–166.
- Suseno, D. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Sutini. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Via. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Wahyuningsih, S. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Weidenstedt, L. (2017). *A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change*. Department of Sociology, Stockholm University.
- Widiasto. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Widodo, A. (2019). *Dinamika Pembangunan Desa Wisata Rintisan Museum Alam Indonesia [Personal Communication]*.
- Wulandari, A. (2020). Kajian Semantik Prototipe Terhadap Istilah “Desa Wisata.” *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54569>
- Zhuang, X., Yao, Y., & Li, J. (2019). Sociocultural impacts of tourism on residents of world cultural heritage sites in China. *Sustainability*, 11(3), 840.

Tentang Penulis

Muryanti memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia.

E-Mail: muryanti@uin-suka.ac.id